berat dan hukum Islam menjatuhkan hukuman (pertanggungjawaban pidana) yang paling berat atasnya.

- b) Menyerupai disengaja; hukum Islam tidak mengenal istilah “mirip disengaja” kecuali pada kasus pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan fisik yang tidak sampai menyebabkan kematian. Pengertian “tindak pidana yang mirip disengaja” dalam kasus pembunuhan/penganiayaan yaitu melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dan pelaku hanya bermaksud menyerang, tanpa berniat membunuh/menganiayanya. Akan tetapi, perbuatannya itu mengakibatkan kematian.
- c) Tersalah (tidak disengaja); kemaksiatan tersalah adalah jika si pelaku melakukan perbuatan tanpa bermaksud memperbuat kemaksiatan, namun ia tersalah.
- d) Yang dianggap tersalah; kemaksiatan yang dianggap tersalah terdapat pada dua keadaan. Pertama, pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu terjadi akibat kelalaiannya. Kedua, si pelaku menjadi penyebab tidak langsung terjadinya perbuatan yang dilarang dan ia tidak bermaksud melakukannya. Dalam konteks ini, kemaksiatan tersalah lebih besar daripada kemaksiatan yang dianggap tersalah karena pelaku kemaksiatan tersalah melakukan perbuatan dengan sengaja sehingga menimbulkan akibat yang dilarang karena kelalaian dan ketidakhati-hatiannya. Adapun pada kasus yang dianggap tersalah,

merusak pilihan (orang yang dipaksa). Dalam paksaan ini biasanya tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti ancaman dipenjarakan atau diikat untuk waktu yang singkat atau dipukul dengan pukulan yang tidak dikhawatirkan dapat merusak (pukulan-pukulan ringan). Paksaan jenis ini dinamakan paksaan relatif atau paksaan tidak berat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal paksaan adalah: Ancaman bersifat *mulji'* yakni yang akan mengakibatkan bahaya yang besar (ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa atau anggota badan) sehingga dapat menghapuskan kerelaan, seperti pembunuhan, pukulan yang keras, pengikatan dan penahanan dalam waktu yang lama. Ancaman harus berupa perbuatan yang dilarang, yakni yang tidak disyariatkan. Ancaman harus seketika (mesti hampir terjadi saat itu juga) yang dikhawatirkan akan dilakukan jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan perintah pemaksa. Orang yang memaksa (mengancam) harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancamannya sebab paksaan tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya kemampuan. Orang yang menghadapi ancaman (dipaksa) harus meyakini bahwa ancaman yang diterimanya benar-benar akan dilaksanakan oleh orang yang memaksanya apabila kehendak si pemaksa tidak dipenuhinya.

menerus. Terkadang ia kambuh dan terkadang ia sembuh. Jika sedang kambuh akalnya akan hilang secara sempurna, namun jika telah sembuh, akalnya kembali normal. Orang yang menderita gila kambuhan tidak bertanggung jawab secara pidana ketika gila sedang kambuh, sedangkan jika akalnya sudah kembali normal, ia tetap akan dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

- iii. Gila sebagian yaitu gila yang tidak secara keseluruhan atau gila (tidak dapat berpikir) yang hanya sebatas pada satu aspek atau lebih. Dalam hal ini, si penderita kehilangan kekuatan berpikirnya dalam satu atau beberapa aspek (perkara) tertentu saja, tetapi ia dapat menggunakannya pada perkara lainnya. Orang yang gila sebagian ini tetap dikenai tanggung jawab pidana atas apa yang dapat dijangkau oleh akalnya dan tidak bertanggung jawab pada apa yang tidak dijangkaunya.
- iv. Dunggu yaitu keadaan yang sedikit pemahamannya, kacau pembicaraannya, dan rusak penalarannya, baik timbul karena sakit maupun pembawaan sejak lahir. Orang dunggu akan diampuni dari tanggung jawab pidana.
- v. Epilepsi dan histeria (gangguan saraf) yaitu kondisi-kondisi dan gejala gangguan urat saraf yang tampak pada orang yang menderita sakit tersebut. Orang tersebut akan kehilangan perasaan, pilihan (*ikhtiyar*), dan kekuatan berpikirnya. Para penderita

penyakit tersebut dihukumi seperti orang yang terpaksa: mempunyai kekuatan berpikir tetapi tidak mempunyai pilihan. Jika kekuatan berpikir (akal) dan pilihan (*ikhtiyar*) mereka tidak hilang, mereka bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan mereka.

- d) Anak belum dewasa (anak di bawah umur); Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum pertama yang meletakkan tanggung jawab anak-anak yang tidak berubah dan berevolusi sejak dikeluarkannya. Fase-fase yang dilalui manusia dari sejak lahir sampai usia dewasa terdiri atas tiga fase yakni : yang pertama fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*). Fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum ia berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *ta'dib* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* apabila dia melakukan tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas. Walaupun begitu tanggung jawab perdata dalam hal ganti rugi harta dan jiwa seseorang tetap menjadi tanggung jawab mereka. Yang kedua fase kemampuan berpikir lemah. Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia